penandata

# FKPKN
# TRIWULAN IV
## TAHUN 2023

Kanwil DJPb
PROVINSI JAMBI

Telp.
(0741) - 668802

Jl. M. Yoesoef Singadikane
No. 45, Telanaipura, Kota
Jambi, 36122

# Kata Pengantar

## Burhani AS

*Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi*

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dapat menyusun Laporan kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) secara tepat waktu.

Laporan kegiatan FKPKN ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan IV tahun 2023 dalam rangka memenuhi tugas Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai *Treasury*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini terutama kepada Satuan Kerja mitra Kanwil DJPb, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi dan unit eselon I Kementerian Keuangan Provinsi Jambi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana untuk menyediakan informasi kegiatan-kegiatan terkait fiskal dan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jambi, 9 Januari 2024
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS

# Tim Penyusun

LForum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara
Kanwil DJPb Provinsi Jambi
Triwulan IV Tahun 2023

**Burhani AS**
*Pengarah*

**Fauzi Syafriel**
*Ketua*

**Istiqomah Handayani**
**Rr. Raina Avissa D. B.**
*Penyusun*

# Daftar Isi


i Kata Pengantar

ii Tim Penyusun

iii Daftar Isi

iv Executive Summary

1 Latar Belakang

2 Identifikasi Masalah

4 Pelaksanaan Kegiatan Periodik

31 Pelaksanaan Kegiatan Strategis/Tematik

41 Pelaksanaan Kegiatan Local Expert

47 Kesimpulan dan Rekomendasi

# Executive Summary

Kanwil DJPb Provinsi Jambi melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) tingkat daerah secara aktif berkolaborasi dan bersinergi baik dengan Kemenkeu Satu, berbagai tim/forum daerah, pimpinan pemerintah daerah, dan *local expert* melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta arahan dan rekomendasi sebagai wujud peran Kanwil DJPb dalam membantu penyelesaian berbagai isu/permasalahan perekonomian dan fiskal di daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat terhadap masyarakat.

Selama periode triwulan IV tahun 2023, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan sebanyak 17 kegiatan periodik, 8 kegiatan strategis/tematik yang terdiri atas 3 kegiatan strategis dan 5 kegiatan tematik, serta 3 kegiatan yang melibatkan *local expert* dengan rincian sebagai berikut.

**1. Kegiatan Periodik**

Kegiatan rutin yang dilaksanakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Jambi maupun unit vertikal yang telah dilaksanakan diantaranya Bazar UMKM HORI ke-77, Semarak Bazar UMKM (SERBU) KPPN Muara Bungo, *Joint* Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBN Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi, Laporan Monev EPA KPU, Bawaslu, Polresta Jambi dan PNBP BPA serta BKKBN dalam Mendukung Reviu Belanja dan Monev Harmonisasi Belanja Pemerintah serta Transfer TKD Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan KFR Triwulan IV TA 2023, Monev KUR Semester II Tahun 2023 di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sarolangun, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Merangin, Koordinasi Peluang Investasi Daerah dengan DPMPTSP Kabupaten Merangin, FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Asistensi BLUD pada RSUD Raden Mattaher Jambi, Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2024, dan Rangkaian Rapat ALCo Regional baik Teknis, *Deputies*, dan Komite.

**2. Kegiatan Strategis/Tematik**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai upaya untuk menunjang bahasan tematik Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional diantaranya FGD Pembahasan *Draft Emission*

*Reduction Payment Agreement* (ERPA), *JEBAC International Conference*, *Treasury Goes to School, Workshop* Penggunaan Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Prodi IV Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi, dan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur, dan Pemprov Jambi. Sementara itu, kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan keterlibatan berbagai tim atau forum daerah diantaranya Rekonsiliasi Data dan Iuran IWP 8%, JKK, dan JKM PNS, PPPK, dan Pejabat Negara Caturwulan III Tahun 2023, Rilis Bersama Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan III 2023, dan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Betung-Tempino-Jambi pada Seksi III.

**3. Kegiatan *Local Expert***

Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan *local expert* Provinsi Jambi berupa Rapat Komite ALCo Regional Jambi Realisasi sampai dengan November 2023, *Treasury Goes to Campus*, FGD Diseminasi Fiskal Regional dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal Daerah sesuai Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 dan Rapat dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara, dan FGD Diseminasi dan FKPKN Fiskal Regional terkait Kondisi dan Strategi dalam Pengurangan Pengangguran.

# LATAR BELAKANG.

*Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV*

## LATAR BELAKANG

Tahun 2023, merupakan tahun keempat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, ekonomi global dihadapkan pada tantangan baru yang tidak kalah serius. Kekhawatiran akan resesi merebak seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meroketnya inflasi di berbagai negara, dan peningkatan suku bunga global. Padahal, sampai dengan tahun 2023 ini luka-luka pandemi belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Faktanya, tingkat pengangguran masih relatif tinggi dan tingkat pendapatan usaha masih menurun di sejumlah sektor. Bahkan sejumlah negara masih rentan dilanda krisis pangan dan energi.

Tahun ini penuh tantangan dalam mengelola keuangan negara karena masih dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 dan isu geopolitik serta menjadi tahun dimana batas maksimal defisit anggaran kembali ke angka 3%. Untuk menghadapi hal tersebut, pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sehingga dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi dan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, terkait penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), seluruh elemennya pada tahun ini disalurkan melalui KPPN di daerah. Ini merupakan tantangan tersendiri mengingat tahun sebelumnya, tidak seluruh elemen TKD disalurkan KPPN di daerah.

Keberadaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) walaupun belum lama keberadaannya, namun manfaatnya sudah dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Adapun dana APBN yang dikelola di wilayah Jambi mencapai Rp20,49 Triliun, yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga Rp6,57 Triliun dan TKD sebesar Rp13,92 Triliun. Berbagai kegiatan terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Dengan adanya FKPKN, kesadaran untuk bersinergi semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan antusiasme terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPKN.

Permasalahan yang berulang setiap tahun anggaran masih saja terjadi. Kondisi ini menunjukan pengelolaan keuangan negara yang belum berkualitas. Dengan sinergi dan berkolaborasi, diharapkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara mampu menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi isu-isu pembangunan regional. Tidak terbatas pada pengelolaan Keuangan Daerah saja, namun juga dapat memberikan dukungan nyata di level ekonomi regional kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menumpuknya pencairan dana di akhir tahun masih saja terjadi di tahun 2022 walaupun intensitasnya semakin menurun. Namun demikian, hal ini menjadi perhatian pimpinan sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan pelaksanaan anggaran terus menurus diadakan sejak awal tahun 2023 dalam rangka edukasi dengan harapan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan anggaran.

Dari berbagai dinamika dalam pengelolaan fiskal di daerah dan pengelolaan keuangan negara di daerah pada khususnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sinergi antar unit terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan kualitas yang lebih baik.

# IDENTIFIKASI MASALAH.

*Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV*

## IDENTIFIKASI MASALAH

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Treasury, Regional Chief Economist* (RCE), dan *Financial Advisor* dalam Triwulan IV tahun 2023 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. Akselerasi penyaluran TKD merupakan tantangan tersendiri mengingat mulai tahun 2023, semua elemen TKD disalurkan melalui KPPN di daerah.
2. Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait pembiayaan.
3. Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompentensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional.
4. Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indikator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output
5. Penguatan dan Kerjasama dengan pihak Eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi.
6. Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti pemulihan ekonomi dan pembangunan jalan tol.

Adapun terkait isu/permasalahan yang ada di Kanwil DJPb Jambi dan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

| No | Isu/Permasalahan | Peran/Kontribusi/Tindak Lanjut/ Kanwil DJPb/ Kanwil Kemenkeu |
|---|---|---|
| 1. | Perlunya untuk meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD. | Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD serta dana TKD seperti *Joint* Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBN Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Merangin, FGD Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Koordinasi Peluang Investasi Daerah dengan DPMPTSP Kabupaten Merangin, dan Asistensi BLUD pada RSUD Raden Mattaher Jambi. |
| 2. | Peningkatan kerjasama untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jambi khususnya terkait pembiayaan. | Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Provinsi Jambi dalam pembiayaan seperti Bazar UMKM HORI ke-77, Monev |

| | | |
|---|---|---|
| | | KUR Semester II Tahun 2023, dan Koordinasi dengan Dinas Koperasi. |
| 3. | Penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu dan peningkatan kompentensi pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jambi khususnya terkait penyusunan Kajian Fiskal Regional dan ALCo Regional. | Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan internal maupun eksternal Kemenkeu Satu seperti Rapat ALCO Regional Tingkat Teknis, Deputies dan Komite setiap bulannya serta Rapat FKPKN setiap semester. |
| 4. | Strategis Perbaikan Nilai IKPA dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan memperhatikan indicator dalam IKPA terutama indikator penyerapan anggaran dan capaian output | Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan seperti Monev EPA KPU, Bawaslu, Polresta Jambi dan PNBP BPA serta BKKBN dalam Mendukung Reviu Belanja dan Monev Harmonisasi Belanja Pemerintah serta Transfer TKD Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan KFR Triwulan IV TA 2023 |
| 5. | Penguatan dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti akademisi, profesional lokal di bidang ekonomi dan keuangan negara (*local expert*) di wilayah Provinsi Jambi. | Kanwil mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM seperti mengundang *local expert* pada FGD Diseminasi Fiskal Regional dalam Mengatasi Ketimpangan Fiskal Daerah sesuai Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 dan Rapat dalam Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Serta FGD Diseminasi dan FKPKN Fiskal Regional terkait Kondisi dan Strategi dalam Pengurangan Pengangguran |
| 6. | Koordinasi dengan pihak eksternal diperlukan lebih mendalam terkait isu-isu strategis seperti pemulihan ekonomi, BioCF, dan pembangunan jalan tol. | Kepala Kanwil beserta jajarannya berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada Rilis Bersama Perekonomian Provinsi Jambi, FGD Pembahasan *Draft Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA), Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Betung-Tempino-Jambi pada Seksi III. |
| 7. | Perlu berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah/ Pimpinan Lembaga terkait supaya peran Kanwil sebagai *Treasury. Financial Advisor,* dan *Regional Chief Economist* dapat memberi dampak bagi masyarakat seperti pemulihan ekonomi dimana APBN yang memiliki peran dalam memantik | Kepala Kanwil berkoordinasi aktif dengan Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Kepala BI Jambi, dan Bupati dalam wilayah Provinsi Jambi sebagai Perwakilan Kemenkeu di Jambi. |

# PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK.

Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV

## PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODIK

### 1. BAZAR UMKM HORI KE-77

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan bazar UMKM dalam rangka HORI ke-77 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 bertempat di Halaman KPP Jambi Telanaipura.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Kemenkeu Satu Provinsi Jambi, para *stakeholder* Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi, serta UMKM Binaan Kemenkeu Satu Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Bersamaan dengan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-77, Kementerian Keuangan di daerah khususnya di Provinsi Jambi menyelenggarakan rangkaian perlombaan dengan acara puncaknya diselenggarakan pada hari Minggu, 29 Oktober 2023. Pada acara puncak tersebut diadakan juga bazar UMKM yang merupakan sarana memberikan *exposure* kepada UMKM binaan di daerah.

Bazar UMKM terbuka untuk umum dengan jumlah pengunjung sekitar 390 orang. Selain Bazar UMKM, terdapat acara lain di antaranya jalan santai, pengumuman pemenang lomba HORI, penampilan *band*, pembagian *doorprize* serta simulasi lelang. Simulasi lelang dilakukan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat umum terkait tata cara lelang yang dilakukan oleh KPKNL.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan bazar UMKM pada puncak acara peringatan HORI ke-77 Provinsi Jambi yang merupakan bentuk sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dapat memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan omset dan aset. Total omzet seluruh UMKM pada acara Puncak HORI ke-77 mencapai Rp19.719.500.

**2. SEMARAK BAZAR UMKM (SERBU) KPPN MUARA BUNGO**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan SERBU dilaksanakan pada hari Mnggu, tanggal 29 Oktober 2023 di area *Car Free Day* (CFD), Jalan Sultan Thaha Kabupaten Bungo (depan kantor KPPN Muara Bungo).

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai KPPN Muara Bungo dan didukung oleh berbagai pihak, diantaranya: a) KPP Pratama Muara Bungo; b) Diskoperindag Kabupaten Bungo; c) Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo; d) Perum Bulog Cabang Kabupaten Bungo; e) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bungo; f) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo; g) Perbankan lingkup Kabupaten Bungo; h) PT. PNM Mekaar Lingkup Kabupaten Bungo; serta i) pengusaha UMKM mitra MEMBUMi.

**c. Rincian Kegiatan**

Semarak Bazar UMKM (SERBU) adalah kegiatan bazar untuk para pelaku UMKM dan Ultra Mikro di Lingkup KPPN Muara Bungo. SERBU dilaksanakan bersamaan guna memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-77 dan HUT Kabupaten Bungo ke-58. Kegiatan bazar dibuka dengan dengan sambutan oleh Ibu Ambar Pusporini, selaku Kepala KPPN Muara Bungo, dan diresmikan oleh Sekretaris Daerah KabupateN Bungo, Bapak Drs. Mursidi, M.M, serta dihadiri oleh Kepala Disperindag Kab. Bungo, Kepala Bappeda Kab. Bungo, Kepala KPP Pratama Muara Bungo, para pimpinan perbankan dan BUMN di wilayah Muara Bungo. Acara SERBU Tahun 2023 ini terbuka untuk umum dan diramaikan oleh masyarakat Muara Bungo, serta dipandu oleh Bapak Ojad Sudrajad (PTPN Mahir KPPN Muara Bungo) selaku MC dan juga merupakan Duta MEMBUMi.

Sekitar 30 (tiga puluh) pelaku UMKM bergabung dalam bazar yang juga diramaikan oleh BULOG Kab Bungo yang menjual sembako murah, BPJS Tenaga Kerja, dan PNM Mekaar yang memberikan informasi pembiayaan UMi. Kegiatan ini juga didukung oleh perbankan wilayah Muara Bungo seperti BNI, BRI, BSI, Bank Mandiri, Bank 9 Jambi yang ikut memeriahkan bazar, dengan menyediakan doorprize dan hadiah menarik bagi para pengunjung.

Dalam kegiatan SERBU tahun ini, juga diselenggarakan kegiatan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bungo (RSUD H. Hanafie Muara Bungo), peserta yang mengikuti donor darah adalah, para pegawai KPPN Muara Bungo, para undangan, dan juga masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan SERBU diharapkan dapat memperluas jaringan UMKM dan dapat mengembangkan usaha pelaku UMKM dengan lebih banyak konsumen yang membeli dan mengetahui produk-produk UMKM. Kegiatan SERBU meningkatkan sinergi antara KPPN Muara Bungo dan pelaku UMKM yang menjadi mitra MEMBUMi sehingga MEMBUMi semakin dikenal oleh masyarakat dan masyarakat dapat memiliki jiwa MEMBUMi yang semangat dalam memperkenalkan UMKM Kabupaten Bungo lebih marak lagi. Kegiatan SERBU ini juga meningkatkan sinergi Kemenkeu Satu dengan mitra kerja baik satuan kerja, Pemda, dan perbankan sebagai sumber pembiayaan dalam memberdayakan UMKM.

## 3. *JOINT* MONITORING DAN EVALUASI REALISASI APBN BULAN OKTOBER TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *Joint* Monitoring dan Evaluasi APBD dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya realisasi belanja pada APBD dengan salah satu yang menjadi tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah Pemerintah Provinsi Jambi karena dinilai masih memiliki kinerja serapan belanja APBD belum optimal, yaitu kinerja realisasi belanja APBD masih rendah dan rasio dana di perbankan terhadap volume APBD relatif tinggi.

Dari kegiatan tersebut didapati bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan data pajak Provinsi Jambi yang tetap dan rendahnya realisasi APBD Provinsi Jambi, antara lain:

- Proses input PAD belum otomatis melainkan dilakukan secara manual antara lain pajak kendaraan, sehingga kemungkinan terjadi selisih sangat tinggi.
- APBD Provinsi Jambi setelah dilakukan perhitungan terhadap perkiraan pendapatan dari PAD dan Dana Transfer diperkirakan akan ada *cash mismatch* kurang lebih Rp300 Milyar, sehingga diperlukan penyesuaian belanja untuk mengatasi kondisi tersebut.
- Terdapat *event-event* nasional seperti STQH yang saat penyusunan APBD belum muncul.
- Terdapat beberapa kegiatan yang dibintangi karena berpotensi akan menambah defisit anggaran.
- Ada beberapa kebijakan Pemerintah pusat seperti PMK 212 tahun 2022 diterima terlambat.
- Pendapatan transfer banyak yang masuk ke TDF. Apakah kebijakan TDF ini masih akan berlanjut lagi di tahun mendatang.
- Pajak rokok ditransfer per triwulan, sehingga jika monitoring dan evaluasi dilakukan pada tengah triwulan maka belum terlihat kondisi riilnya.
- Realisasi pembayaran P3K belum dilakukan karena akan disalurkan serentak baik untuk nakes, guru, dll yang penyaluran direncanakan akan dirapel dan dianggarkan pada APBD-P.

Sementara itu, terkait dengan kontrak DAK Fisik Rumah Sakit yang penyelesaiannya di akhir tahun yaitu tanggal 29 Desember 2023, DPKPD Provinsi Jambi sudah mengingatkan Rumah Sakit bahwa pelaporannya paling lambat di tanggal 15 Desember 2023, sehingga kontrak tersebut harus dilakukan addendum. Pihak DPKPD Provinsi Jambi akan mengingatkan kembali sekaligus mengecek apakah sudah dilakukan addendum.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan diharapkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam pengelolaan Keuangan makin meningkat dan harmonis. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selain itu, diharapkan kedepannya diskusi dan koordinasi seperti ini dapat terus berlanjut dan jika tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring maka bisa melalui daring.

**4. MONEV EPA KPU, BAWASLU, POLRESTA JAMBI DAN PNBP BPS SERTA BKKBN DALAM MENDUKUNG REVIU BELANJA DAN MONEV HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH SERTA TRANSFER TKD TAHUN 2023 DALAM RANGKA PENYUSUNAN KFR TRIWULAN IV TA 2023**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan pada hari bertempat di masing-masing satker KPU Provinsi Jambi, Polresta Jambi, BPS Provinsi Jambi, dan BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini melibatkan Kasi PPA I, staf PPA I dan staf PPA II dengan perwakilan masing – masing satker.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengejar target pelaksanaan anggaran triwulanan dan pemenuhan pelaksanaan monev PNBP sehingga perlu dilakukan penajaman pada penyelesaian masalah (*problem solving*) atas permasalahan teknis operasional (*bottleneck*) di tahapan eksekusi belanja satker, termasuk satker PNBP. Selain itu, kegiatan ini juga untuk melakukan harmonisasi rincian output dengan DAK Fisik.

Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diantaranya:

1) KPU Provinsi Jambi akan bersurat ke Kanwil DJPb terkait revisi Belanja modal ke Kanwil DJPb Prov. Jambi sehingga segera didapatkan putusan dan perubahan *closing date* ke seluruh KPU lingkup wilayah Jambi dengan tembusan Kanwil DJPb Prov. Jambi.
2) Untuk KPU Kab/kota yang memerlukan perubahan *closing date* diperlukan pengisian pemutakhiran data di aplikasi Sehati dengan kelengkapan surat permintaan dan pembukaan rekening yang telah disetujui KPPN.
3) Rekening Hibah di lingkup KPU Provinsi Jambi akan segera dimintakan izin ke KPPN setempat untuk pembukaan rekeningnya.
4) Berkaitan dengan VA untuk hibah di lingkup Bawaslu akan dikoordinasikan intensif antara Bawaslu dengan unit eselon I serta KPPN setempat agar tidak terjadi kendala.
5) Register Hibah di lingkup Polda Jambi diperkirakan akan diajukan pada Januari 2024.
6) Untuk realisasi sumber dana PNBP di lingkup BPS diperkirakan akan dilaksanakan tepat waktu dan dapat terserap s.d akhir TA 2023.
7) Berkaitan dengan IKPA di lingkup KPU telah diakomodir oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan adanyan nota dinas dari Dir PA ke Dir SITP

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi didapati bahwa satker KPU Prov. Jambi, Polresta Jambi, BPS Provinsi Jambi dan BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi akan berupaya untuk melakukan penyerapan anggaran

semaksimal mungkin untuk menjaga nilai IKPA serta melaporkan capaian outut tepat pada waktunya.

## 5. MONEV KUR SEMESTER II TAHUN 2023 DI KABUPATEN MERANGIN DAN KABUPATEN SAROLANGUN

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Monev KUR di Kabupaten Merangin dilaksanakan pada hari Rabu, 22 November 2023 dan di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada hari Kamis, 23 November 2023. Kedua kegiatan tersebut dilakukan dari pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB di masing-masing tempat tinggal atau tempat usaha pelaku UMKM.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan tim monev yang merupakan perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan KPPN Bangko dengan didampingi oleh tim dari Bank BRI.

### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan Monev KUR di Kabupaten Merangin dilaksanakan kepada 4 (empat) debitur KUR dari BRI Cabang Bangko, sementara di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan kepada kepada 3 (tiga) debitur KUR dari BRI Cabang Sarolangun. Seluruh survei dilaksanakan dengan berpedoman pada kuesioner Monev KUR Semester II Tahun 2023 yang diberikan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Kegiatan Monev KUR Semester II Tahun 2023 di Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Seluruh jawaban responden atas kuesioner yang diberikan telah dicatat dan selanjutnya akan dikompilasi dengan hasil survei dari daerah lainnya di Provinsi Jambi untuk disatukan ke dalam Laporan Monev KUR Semester II Tahun 2023.

### d. Hasil yang Dicapai

Dari kegiatan Monev KUR yang telah dilaksanakan, seluruh responden menyatakan tertarik untuk mendapatkan KUR di masa mendatang dan sebagian

besar menyatakan sangat puas terhadap program KUR yang sedang berjalan. Adapun beberapa hal yang perlu diperbaiki menurut responden adalah minimalisir biaya potongan yang terlalu banyak khususnya biaya notaris, harapan agar plafon ditingkatkan, dan KUR tanpa agunan untuk semua skema.

**6. KOORDINASI DENGAN DINAS KOPERASI KABUPATEN SAROLANGUN**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sarolangun dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2023 pada pukul 14.00 s.d. 15.00 WIB dan dilanjutkan pada hari Kamis, 23 November 2023 pada pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sarolangun.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Bidang PPA II dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskop Kab. Sarolangun beserta staf dan Koperasi Kab. Sarolangun yang mengikuti Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan UMi pada bulan September.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait rekonsiliasi pinjaman KLP Singkut dan tindak lanjut sosialisasi penyaluran pembiayaan UMi kepada koperasi. Pada hari pertama dibahas mengenai kelanjutan pinjaman KLP Singkut yang seharusnya sudah mencapai tahap audit oleh BPKP. Pada hari kedua, Kanwil DJPb dipertemukan dengan koperasi yang berminat menjadi penyalur UMi dengan hasil ketiga koperasi yang hadir akan memperbaiki dan melengkapi dokumen persyaratan.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Berita terakhir dari KLP Singkut yaitu pengurus yang tersisa dan mengetahui terkait pinjaman KLP Singkut kepada negara sudah meninggal. Namun demikian, usaha penjualan pupuk dan Bangun Serah Guna (BSG) masih dijalankan oleh anak dan menantu.
2) Sejauh ini tidak ada koordinasi dengan Diskop Sarolangun terkait audit BPKP sehingga Diskop juga tidak mengetahui.

3) Tim DJPb kembali menawarkan ketiga koperasi yang hadir untuk menjadi penyalur UMi dengan menyampaikan kembali persyaratan, porsedur, dan tahapan penjajakan sampai dengan pencairan.
4) Ketiga pengurus koperasi yang hadir menyatakan sangat berminat dan usaha koperasi akan sangat terbantu, termasuk menigkatkan kesejahteraan anggotanya.
5) Pengurus KSP JTM menyatakan akan memulai proses untuk menyiapkan persyaratan, namun masih ada kendala, yaitu syarat menjalankan simpan pinjam minimal 2 tahun. Syarat ini baru dapat dipenuhi pada awal tahun 2024.
6) Pengurus BMT Taqwa menyatakan akan menyiapkan persyaratan dan tahapan untuk berperan sebagai penyalur UMi.
7) Pengurus KSP GAP juga menyatakan sangat tertarik, namun demikian masih belum dapat memenuhi persyaratan NPL di bawah 5%. KSP GAP akan memperbaiki kinerja keuangan untuk menekan NPL yamg masih sekitar 15%.
8) Di akhir pertemuan, setelah perbincangan mengenai kegiatan usaha masing-masing koperasi, Tim DJPb Jambi dan pengurus koperasi bertukar nomor kontak untuk komunikasi dan koordinasi lebih lanjut.

## 7. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMDA KABUPATEN MERANGIN

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 November 2023 pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Kantor BPKAD Kabupaten Merangin.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan BPKAD Kabupaten Merangin serta Tim dari Bidang PPA II dan Tim dari KPPN Bangko.

### c. Rincian Kegiatan

Pembinaan kepada Pemda Kab. Merangin dilaksanakan dalam rangka melakukan sinergi antara pimpinan Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Jambi dengan Para Pimpinan Daerah, untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pembangunan daerah, agar selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, khususnya terkait kebijakan penyaluran dana APBN di regional.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Bapak Mashyuri (Kepala BPKAD Kab. Merangin) dan dilanjutkan dengan penyampaian maksud kedatangan Tim DJPb Jambi oleh Bapak Fauzi Syafriel (Kepala Bidang PPA II). Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda Kab. Merangin disambut dengan baik oleh BPKAD Merangin dengan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kab. Merangin.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, adapun saran yang diberikan kepada Pemda antara lain:

1) Tedapat ketimpangan yang cukup tinggi antara RKUD Kab Merangin dengan pemda lain di Provinsi Jambi, secara peta fiskal posisi Kab. Merangin masih rendah sehingga perlu peningkatan fiskal. Penanganan ketimpangan ini akan cukup banyak menyelesaikan permasalahan kekurangan kas daerah.
2) Perlu peningkatan hasil dari BLUD, namun demikian akan ada lagi bagian ADD setelah hasilnya menjadi retribusi. *Local tax ratio* perlu juga ditingkatkan, Kab. Merangin dapat melihat pengelolaan PAD di Kota Jambi.
3) Perlu diberi pemahaman bagi OPD kesehatan agar mengelola dana dengan baik karena ada banyak sumber termasuk DAU SG bidang Kesehatan, DAK Nonfisik Puskesmas, dan DAK Fisik. Pengelolaan yang tidak optimal akan berefek besar.
4) LKT dan LRT yag sudah masuk rekening koran agar dimasukan walaupun akan menjadi selisih.
5) Kartu kredit pemerintah merupakan bagian dari uang persediaan (40% dari UP), perubahan porsi memerlukan ijin, digunakan untuk operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Pembayaran tiap bulan sesuai tagihan bank, atau tagihan sementara. Tanggung jawab penggunaan ada pada pemegang kartu kredit. Kejadian pembobolan harus segera diatasi dengan lapor ke bank penerbit. Pembobolan KKP biasanya terjadi dengan transaksi di luar negeri.
6) IKPA menjadi ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang bisa diadopsi BPKAD. IKPA dijelaskan secara singkat dari maksudnya sampai formulanya.

## 8. KOORDINASI PELUANG INVESTASI DAERAH DENGAN DPMPTSP KABUPATEN MERANGIN

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 22 November 2023 pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Merangin.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan DPMPTSP Kabupaten Merangin serta Tim dari Bidang PPA II dan Tim dari KPPN Bangko.

**c. Rincian Kegiatan**

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui iklim investasi untuk dapat menganalisis potensi sumber daya baik sektoral, komoditas unggulan, maupun atas proyek Pemerintah Daerah yang sedang dan akan dikembangkan dan berpotensi untuk dibiayai melalui pinjaman daerah.

Kegiatan ini dibuka dengan penerimaan dan penyambutan Bapak Ibrahim (Kepala DPMPTSP Kab. Merangin) dan perkenalan serta penyampaian maksud kedatangan Tim Kanwil DJPb Jambi oleh Bapak Fauzi Syafriel (Kepala Bidang PPA II). Adapun beberapa hal yang didiskusikan antara lain:

1) Tren perijinan usaha saat ini Sebagian besar dari usaha galian C (pasir dan batu), ada sedikit pengaruh dari pembangunan jalan tol dan proyek-proyek lainnya. Perijinan diberikan Pemda Provinsi Jambi dan pajaknya dipungut di Kabupaten Merangin. Masih ada beberapa hal administratif dan koordinasi yang perlu dibenahi. Perijinan baru diketahui Kab. Sarolangun saat ijin sudah keluar. Secara teknis, ijin yang sudah keluar dengan volume yang sudah ditetapkan belum dipungut pajak, yang seharusnya dipungut di depan.
2) Dalam rencana induk pariwisata, potensi wisata Kab. Merangin diyakini sangat bernilai tinggi seperti Geopark, Danau Pauh Jangkat, dan Danau Depati Empat. Pengembangan wisata masih belum menjadi perhatian, hal ini disebabkan sarana dan prasarana pendukung yang belum siap. Akses menuju lokasi wisata masih menjadi kendala utama untuk memasarkan wisata, belum ada upaya untuk mengurangi jarak atau waktu menuju tempat wisata. Kendala lainnya adalah masih perlu penyesuaian perda pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, kesamaan pandangan dari OPD Kab Merangin, kurangnya kemampuan SDM untuk menghitung/mengkaji investasi wisata, kurangnya data dan informasi untuk kajian, dan tidak tersedia dana untuk membiayai konsultan atau membiayai kerjasama dengan perguruan tinggi. DPM PTSP juga belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang telah dilakukan, dibahas mengenai proyek investasi potensial yang direncanakan di Kab. Merangin. Namun demikian proyek – proyek tersebut masih mengalami banyak kendala seperti belum adanya akses jalan yang memadai menuju proyek pariwisata, belum adanya kajian, serta masih perlunya penyesuaian perda.

**9. FGD PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan FGD dilaksanakan pada hari Senin, 4 Desember 2023 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB bertempat di Aula Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai narasumber dan perwakilan unit pelaporan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi sebagai peserta kegiatan serta Bidang PAPK.

**c. Rincian Kegiatan**

*Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dengan seluruh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi dan memberikan peningkatan bekal pemahaman kepada pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan sehingga mempertahankan predikat opini WTP atau mendapatkan WTP bagi pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan seluruh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi. Selain itu, kegiatan FGD ini juga untuk sarana penguatan koordinasi dan sinergi seluruh unsur pengelola transfer ke daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyaluran Transfer ke Daerah pada tahun anggaran 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan penyampaian materi yaitu Sosialisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 oleh perwakilan dari DJPK, Diseminasi *Government Finance Statistics* (GFS) oleh Kepala Seksi ASPLK Kanwil DJPb Provinsi Jambi, dan PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan oleh Kepala Seksi PSAPD Kanwil DJPb Provinsi Jambi. Acara kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan FGD yang telah dilakukan, didapati bahwa Kebijakan TKD Tahun 2024 sebagian besar sama dengan tahun lalu dan beberapa masih dalam proses penerbitan PMK. Secara garis besar, pelaksanaan TKD di pemerintah daerah lingkup Provinsi Jambi TA 2023 telah disalurkan secara baik, meskipun terdapat beberapa penyaluran pada pemerintah daerah yang diperlukan koordinasi lebih lanjut agar seluruh dana TKD dapat disalurkan dengan maksimal. Pemerintah Daerah di lingkup Provinsi Jambi juga telah menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan PSAP 04.

## 10. ASISTENSI BLUD PADA RSUD RADEN MATTAHER JAMBI

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan asistensi dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Desember 2023 pukul 08.30 s.d. 10.00 WIB bertempat di Ruang Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kassubag Perbendaharaan RSUD Raden Mattaher, Kasi PPA II C serta Pelaksana PPA II C Kanwill DJPb Provinsi Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi RCE dalam melakukan asistensi pembinaan BLUD, memperkuat sinergi serta hubungan kerja sama antara Kanwil DJPb dengan BLUD, serta mengetahui kondisi dan tata

kelola BLUD pada RSUD Raden Mattaher Jambi. Kegiatan dibuka oleh Bapak Mustaqim Siga, selaku Kepala Seksi PPA II C dan dilanjutkan dengan asistensi bersama dengan Ibu Kadarwati selaku Kassubag Perbendaharaan RSUD Raden Mattaher.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari kegiatan asistensi BLUD yang telah dilaksanakan, beberapa hal yang disampaikan antara lain:

1) Berkaitan dengan perencanaan, sebelumnya RSUD Raden Mattaher memiliki Rencana Strategi Bisnis (RSB) lima tahunan. Namun, setelah adanya ketentuan baru pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, RSB tidak dibuat lagi dan diganti menjadi Rencana Strategis (Renstra) yang terakhir dibuat untuk tahun 2021-2026.
2) Angka kunjungan Rawat Jalan tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Pada semester I tahun 2023, angka kunjungan Rawat Jalan sudah mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tiga tahun terakhir.
3) Dalam rangka peningkatan kualitas BLUD, hal yang paling dibutuhkan adalah pembangunan komitmen oleh pimpinan. Pimpinan perlu membuat komitmen kesepakatan terkait rencana RSUD sebagai BLUD kedepannya yang dapat mengikat seluruh jajaran rumah sakit untuk berkomitmen dan berpartisipasi meningkatkan kualitas RSUD. Terdapat banyak aspek yang dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan RSUD sebagai BLUD seperti kepatuhan pada SOP, infrastruktur, dan budaya pelayanan.
4) Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Raden Mattaher, pihak Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat menyelenggarakan kegiatan FGD bersama dengan pimpinan BLUD termasuk pimpinan RSUD Raden Mattaher berkaitan dengan sustainabilitas pengelolaan BLUD.

## 11. PENYERAHAN DIPA DAN BUKU ALOKASI TKD TA 2024

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2024 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jambi dan dilaksanakan secara langsung dan melalui *live streaming youtube*.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh satker penerima DiPA Petikan TA 2024, baik yang diserahkan secara langsung maupun melalui *live streaming youtube*; Bupati/Walikota untuk menerima Buku Alokasi TKD 2023; Para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi; jasa perbankan; serta awak media.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan Penyerahan secara digital DIPA dan Buku Alokasi TKD TA 2024 dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bapak Burhani AS yang menyampaikan perkembangan ekonomi terkini dan Pokok-Pokok APBN 2024.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Buku Alokasi TKD TA 2024, Penyerahan DIPA Petikan TA 2024, Penyerahan Penghargaan kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah Terbaik, dan ditutup dengan sambutan Gubernur Jambi.

**d. Hasil yang Dicapai**

Sebanyak 424 DIPA Petikan telah disampaikan kepada satuan kerja lingkup Provinsi Kanwil DJPb Jambi dengan 24 perwakilan satuan kerja dan 12 Bupati/Walikota hadir di Auditorium Rumah Dinas Gubernur untuk menerima DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD secara digital. Penyerahan DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD TA 2024 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi dilaksanakan

dengan turut serta mengawali dan menyampaikan pesan-pesan Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan yang disampaikan di Istana Negara.

**12. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 Oktober 2023**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 14.00 s.d.17.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat pengawas KPPN Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayangan, pejabat pengawas KPDDP Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat fungsional KPKNL Jambi, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE.

**c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C, Bapak Mustaqim. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Oktober 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 31 Oktober 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh pejabat fungsional KPKNL Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat pengawas KPP Jambi Telanaipura, pejabat pengawas KPPN Jambi, dan pejabat pengawas bidang PPA II.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 31 Oktober 2023.
2) Pada semua level pembangunan manusia terdapat tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh

pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

3) Nilai IPM Provinsi Jambi termasuk pada kategori 'tinggi' (antara 70-79) dan ada kecenderungan terus meningkat sejak 2017 (IPM terendah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur), hal ini didukung oleh tingkat penyelesaian pendidikan yang juga terus meningkat meskipun dibutuhkan upaya lebih dari Pemerintah Daerah mendorong agar angkatan kerja didominasi oleh pendidikan SMA atau bahkan perguruan tinggi
4) Selain pendidikan, kematangan usia pernikahan diharapkan dapat menghasilkan keturunan sehat dan berkualitas. Di Provinsi Jambi sendiri, remaja dengan kelompok umur 15-19 th memiliki tingkat fertilitas (ASFR) yang jauh diatas nasional (tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yang dapat berisiko pada *stunting* dan tidak terpenuhinya hak dasar anak (kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan dari kekerasan, dan hak sipil anak).
5) Dari total angkatan kerja, 96% penduduk bekera, dan 4% menganggur. Lapangan usaha Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak pada hampir seluruh kab/kota di Jambi (rata-rata 4 tahun terakhir menyerap 46,28% dari total tenaga kerja yang ada), distribusi terbanyak di Kab. Tebo dan Tanjung Jabung Barat.
6) Lapangan usaha pertanian, menyerap pekerja paling banyak di semua lini pendidikan kecuali perguruan tinggi, dengan pekerja terbanyak dari tamatan SD (70,62%). rata-rata 3 tahun terakhir (2019-2021), penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri paling banyak berasal dari lulusan SD/Sederajat (26,62%) dan hanya sebagian kecil (2,80%) yang berasal dari perguruan tinggi.
7) Pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki untuk menggambarkan hidup yang layak. Upah Minimum Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan secara rata-rata, namun masih banyak pekerja formal yang menerima upah/gaji bersih dibawah UMP utamanya di sektor Pertanian. Hal ini harus menjadi perhatian karena struktur PDRB Provinsi Jambi ditopang dari sektor Pertanian.
8) Kemajuan pembangunan di Jambi terlihat dari kondisi jalan nasional yang baik (mantap) di Jambi tahun 2022 mencapai 86,96%. Sulitnya mengakses suatu daerah yang disebabkan oleh kondisi jalan, akan berakibat juga pada tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi. Tahun 2022 IKK tertinggi ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

9) Provinsi Jambi sangat proaktif dalam pencegahan korupsi, hal ini menjadi landasan awal kondisi kelembagaan dan *good corporate governance* yang baik untuk kemudian dapat meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
10) Teknologi telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam era digital saat ini di segala aspek kehidupan, teknologi informasi sangat mempermudah aktivitas manusia. Dari seluruh kategori subindeks pembangunan Tekonologi Informasi yang ada di Provinsi Jambi masih ada dalam rentang ”rendah” dan ”sedang”. Hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah baik dalam pendidikan keahlian hingga investasi dibidangnya.
11) Untuk menciptakan iklim investasi yang baik Pemerintah harus mampu menekan biaya, meminimalkan resiko, dan membatasi persaingan. Untuk saat ini kontribusi investasi di Provinsi Jambi (±1%) belum terlalu besar bagi Indonesia dibanding Provinsi Lainnya.

## 13. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi Pejabat Administrator pada Unit Kemenkeu yang berlokasi di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams Meeting*.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Perwakilan Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Kepala KPPBC Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan perwakilan pejabat fungsional dan pegawai lingkup Provinsi Jambi.

### c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Kepala Bidang PAPK, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Oktober 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Jambi Telanaipura)
2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (KPPBC TMP B Jambi).
3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN, Special Mission dan issu strategis serta terkait Pokja UMKM (KPKNL Jambi)
4) Realisasi Belanja APBN, dan Isu Strategis (PPA I)
5) Perkembangan Ekonomi Regional dan Realisasi TKD (PPA II)

Pemaparan dilakukan oleh Perwakilan Kepala KPPBC TMP B Jambi, Kepala KPKNL Jambi, Perwakilan Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA II, dan Perwakilan Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin *policy responses* sebagai berikut terkait Isu Tematik ALCo: *Review* dan *Profiling* Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan, Iklim Dunia Usaha dan Investasi di Daerah.

1) Pembangunan SMK Teknologi Pertanian untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki multiplier effect pada kualitas teknologi pertanian, produktivitas sektor pertanian dan upah/gaji bersih disektor ini yang melebihi UMP/UMR di Jambi
2) hilirisasi produk unggulan dan pariwisata, karena sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja
3) Perluasan kriteria penerima Insentif pajak bagi investasi dalam negeri dan luar negeri, serta kemudahan dalam izin berusaha sesuai UU Cipta Kerja
4) Menghimbau masyarakat berperan serta dalam investasi, aktif dalam memasarkan potensi ekonomi unggulan untuk menarik investor, dan intensif koordinasi bersama swasta terkait rencana investasi.

## 14. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2023

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 pukul 10.00 s.d. 11.30 WIB secara daring melalui media virtual Teams (*Meeting ID: 497 905 738 365; Passcode: TJR4dS)*.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas, serta Perwakilan Pejabat Fungsional, Local Expert Provinsi Jambi dari Universitas Jambi serta pelaksana yang ada pada Kelompok Kerja RCE.

**c. Rincian Kegiatan**

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 31 Oktober 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNBP dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 31 Oktober 2023 serta *issue* strategis lainnya.

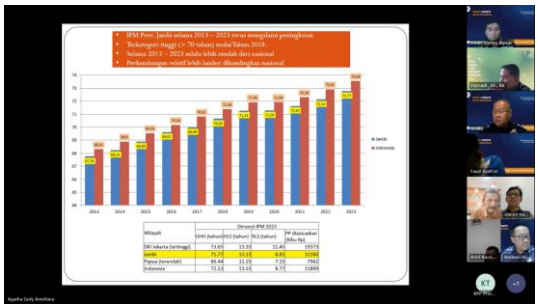

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 31 Oktober 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

1. Terima kasih atas berbagai paparan yang menunjukkan angka yang lebih banyak positifnya. Kita semua optimis baik dari sisi penerimaan dari pagu Rp7,06 triliun, sudah bisa terealisasi sebesar Rp6,57 triiun.
2. Dari sisi perpajakan, pajak, bea cukai dan pnbp, menunjukkan angka positif dan peningkatan meskipun ada yang terkontraksi.
3. Dari sisi belanja negara realisasi 76,25% atas pagu hampir Rp23 triliun merupakan hal yang menggembirakan. Belanja K/L sudah terealisasi 67,5% atas pagu Rp8,73 triliun dan TKD sudah terealisasi 81,71%.
4. Kita harus yakin dari sisi penerimaan bisa melampaui target, baik pajak, bea cukai, dan PNBP.
5. Berbagai analisis tematik terkait pembangunan manusia, aspek ketenagakerjaan dan pelengkapnya merupakan sesuatu yg memberi insight bagi kita semua, melengkapi pengetahuan dan pandangan kita terhadap Provinsi Jambi termasuk green economy. Provinsi Jambi merupakan 2 Provinsi yang pembangunan green economynya menjadi perhatian bagi Indonesia (khususnya karbon) dan mendapat pendanaan internasional.

**15. RAPAT ALCO REGIONAL TEKNIS UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2023 DAN DISKUSI KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA DALAM PDRB BERSAMA BPS**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan rapat teknis dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 pukul 09.00 s.d.11.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi, dilanjutkan dengan diskusi klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB bersama BPS.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan rapat teknis dihadiri oleh pejabat pengawas Kanwil DJPb Provinsi Jambi, pejabat fungsional KPPBC TMP B Jambi, pejabat fungsional KPKNL Jambi, pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, KPP pejabat pengawas Pratama Jambi Pelayangan, dan perwakilan pegawai lingkup Provinsi Jambi yang terlibat dalam tim Pokja Sekber RCE. Setelah rapat teknis dilanjutkan dengan diskusi klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB bersama BPS.

**c. Rincian Kegiatan**

Rapat teknis dibuka oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A, Ibu Istiqomah. Dalam pembukaan disampaikan rundown pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 November 2023, serta topik yang akan dibahas dalam rapat yaitu terkait draft/konsep materi rapat (Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 30 November 2023 dan Isu Strategis).

Pemaparan dilakukan oleh perwakilan pejabat pengawas KPKNL Jambi, perwakilan pejabat pengawas KPPBC TMP B Jambi, perwakilan pejabat pengawas KPP Pratama Jambi Telanaipura, dan pejabat pengawas bidang PPA II.

Diskusi bersama BPS dibuka oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Fauzi Syafriel. Dalam pembukaan disampaikan maksud dan tujuan kegiatan diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh BPS dan diskusi bersama.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Draft/konsep materi yang akan dipaparkan pada rapat ALCo tingkat Deputies dan Komite realisasi s.d. 30 November 2023.
2) Dari total angkatan kerja, ±96% penduduk bekerja, dan ±4% menganggur. Lapangan usaha Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak pada hampir

seluruh kab/kota di Jambi (rata-rata 4 tahun terakhir menyerap 46,28% dari total tenaga kerja yang ada), distribusi terbanyak di Kab. Tebo dan Tanjung Jabung Barat.

3) Lapangan usaha pertanian, menyerap pekerja paling banyak di semua lini pendidikan kecuali perguruan tinggi, dengan pekerja terbanyak dari tamatan SD (70,62%). rata-rata 3 tahun terakhir (2019-2021), penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri paling banyak berasal dari lulusan SD/Sederajat (26,62%) dan hanya sebagian kecil (2,80%) yang berasal dari perguruan tinggi.
4) Pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki untuk menggambarkan hidup yang layak. Upah Minimum Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan secara rata-rata, namun masih banyak pekerja formal yang menerima upah/gaji bersih dibawah UMP utamanya di sektor Pertanian. Hal ini harus menjadi perhatian karena struktur PDRB Provinsi Jambi ditopang dari sektor Pertanian.
5) Secara umum kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Jambi mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari TPAK yang dari tahun ketahun meningkat dan TPT mengalami penurunan. Disisi lain, jika dibandingkan pada periode Februari 2023 dan Agustus 2023, TPT mengalami peningkatan (4,50% menjadi 4,53%) dimana terjadi penambahan pengangguran yang berasal dari sektor Pertanian yaitu ±500 orang pekerja dari perkebunan karet dan pinang.
6) Pengangguran terbanyak di Provinsi Jambi berasal dari lulusan SMK dan SMA, dimana lulusan SMK lebih mendominasi setiap tahun kecuali agustus 2022 dan agustus 2023. Namun hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan bagi lulusan/pengangguran untuk lebih siap bersaing didunia kerja
7) Terdapat peluang untuk mengirimkan tenaga kerja ke Jepang sebagai pekerja ataupun program magang dengan penghasilan yang besar. Peluang ini memerlukan biaya yang besar, antara lain untuk biaya pelatihan. Sosialisasi dari Disnakertrans Provinsi juga dirasakan belum efektif ke angkatan kerja yang menjadi target.
8) Belum maksimalnya penggunaan sarana informasi dan komunikasi untuk bursa kerja dan belum tersedianya situs atau media sosial yang aktif menginformasikan lowongan kerja. Selain itu terdapat budaya setempat yang menginginkan anak perempuan tidak pergi jauh dari kampung halaman. Hal ini juga menjadi penyebab tingginya pengangguran Perempuan di Jambi karena kesempatan kerja lebih banyak di luar domisilinya.
9) Berbagai program kegiatan yang merupakan sinergi APBD dan APBN yang telah dilakukan di Jambi, diantaranya: pendampingan kewirausahaan,

pelatihan keterampilan pariwisata, infrastruktur konektivitas, peningkatan kualitas pembelajaran, dll. Namun masih terdapat beberapa usulan fiscal tool untuk Prov Jambi.

10) Untuk menciptakan iklim investasi yang baik Pemerintah harus mampu menekan biaya, meminimalkan resiko, dan membatasi persaingan. Untuk saat ini kontribusi investasi di Provinsi Jambi (±1%) belum terlalu besar bagi Indonesia dibanding Provinsi Lainnya
11) Kemajuan pembangunan di Jambi terlihat dari kondisi jalan nasional yang baik (mantap) di Jambi tahun 2022 mencapai 86,96%. Sulitnya mengakses suatu daerah yang disebabkan oleh kondisi jalan, akan berakibat juga pada tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi. Diperlukan berbagai dukungan infrastruktur dan fasilitas untuk dapat meningkatkan daya tarik investor pada sektor yang ada, utamanya atas sektor unggulan di masing-masing daerah.

## 16. RAPAT ALCO REGIONAL DEPUTIES UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2023

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Desember 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB secara *hybrid* di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Jambi bagi peserta di Kota Jambi dan melalui media virtual *Teams Meeting* bagi peserta dari luar Kota Jambi.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh Pegawai Administrator Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi, Kepala KPP lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Kepala KPPBC TMP B Jambi, Perwakilan Kepala KPKNL Jambi, Kepala KPDDP Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi, dan Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Jambi.

### c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Irwan Wahyu Basuki. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 November 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan terkait:

1) Realisasi penerimaan perpajakan, isu strategis dan local issue (KPP Pratama Muara Bungo)
2) Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, isu strategis dan *local issue* (KPPBC TMP B Jambi).
3) Realisasi Penerimaan Lingkup DJKN, Special Mission dan issu strategis (KPKNL Jambi)

4) Perkembangan Ekonomi Regional, Realisasi TKD, dan issue strategis (PPA II)

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

1) Isu Penerimaan Negara

- Sinergi dari Kemenkeu Satu untuk dapat memantau perkembangan kinerja penerimaan pajak dari pemungutan bendahara hingga akhir tahun 2023
- Penentuan proyeksi awal tahun 2024 yang lebih presisi akan mampu meminimalisir pelaksanaan harmonisasi target penerimaan pajak.

2) Isu jalan lintas batu bara

- Mempercepat pembangunan jalan khusus untuk angkutan Batu Bara.
- Meningkatkan intensitas perawatan dan perbaikan jalan ruas yang dilalui angkutan batubara eksisting.

3) Isu Potensi pagu minus belanja pegawai dan realisasi belanja modal dan bansos yang masih dibawah target

- Mengimbau satker-satker yang berpotensi mengalami pagu minus belanja pegawai s.d. akhir tahun anggaran terutama pada satker-satker kemenag dan Kemenhan untuk melakukan revisi dalam rangka pemenuhan belanja pegawai hingga akhir tahun anggaran.
- Perlunya dilakukan koordinasi dan monitoring Satker baru BHPJ untuk percepatan realisasi belanja PSN
- Melakukan monitoring Belanja sumber dana PNBP untuk menekan potensi minus MP PNBP TAYL.

4) Isu tidak tercatatnya banyak komoditi ekspor

- Melakukan pengumpulan data terkait pendirian PLB Ekspor yang telah didiskusikan bersama Pemda terkait.
- Memantau progres koordinasi bersama Gubernur sebagaimana yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah pada bulan Desember 2023

5) Isu Proyek Strategis Nasional

Bagi Satker terkait perlu menindaklanjuti dalam:

- Memantau progress revisi anggaran berdasarkan kebijakan pusat dikarenakan dana bersumber dari PHLN

6) Isu Tematik ALCo: *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingkat Pengangguran serta Peran Fiskal (Sinergi APBN-APBD) dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran*. Mendorong Pemda Untuk:

- Bersinergi dengan berbagai Instansi Pemerintah Daerah terkait, dalam meningkatkan kualitas Pendidikan vokasi sosialisasi program ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan pada lulusan SMA/SMK dan pengangguran lainnya.
- Bersama mensukseskan kegiatan pada Lembaga Produktivitas Daerah sebagai wadah untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM di Provinsi Jambi
- Perbaikan infrastruktur jalan dan menambah jumlah Kawasan industri untuk hilirisasi produk unggulan dan pariwisata, karena sektor tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja
- Perluasan kriteria penerima Insentif pajak bagi investasi dalam negeri dan luar negeri, serta kemudahan dalam izin berusaha sesuai UU Cipta Kerja
- Menghimbau masyarakat berperan serta dalam investasi, aktif dalam memasarkan potensi ekonomi unggulan untuk menarik investor, dan intensif koordinasi bersama swasta

## 17. RAPAT ALCO REGIONAL KOMITE UNTUK REALISASI SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2023

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 s.d. 12.30 WIB melalui media virtual Teams (*Meeting* ID: 467 830 681 517; *Passcode*: RDEhyK).

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan ini dihadiri oleh oleh perwakilan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pejabat Pengawas, serta Perwakilan Pejabat Fungsional, Local Expert Provinsi Jambi dari Universitas Jambi serta pelaksana yang ada pada Kelompok Kerja RCE.

### c. Rincian Kegiatan

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang PAPK, Bapak Tri Djoko Yulianto. Dalam pembukaan disampaikan *rundown* pelaksanaan ALCo Regional s.d. 30 November 2023 serta topik yang akan dibahas dalam rapat terkait kinerja realisasi APBN baik dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, penerimaan PNBP

dan Hibah, dan capaian realisasi belanja serta kinerja ekonomi dan regional s.d. 30 November 2023 serta *issue* strategis lainnya.

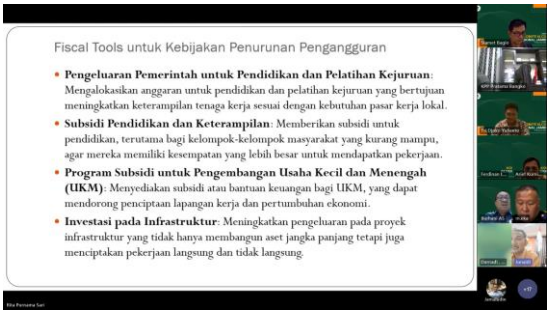


**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah masing-masing instansi Kementerian Keuangan yang ada di daerah pada rapat Komite ALCo regional Provinsi Jambi untuk realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023, sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Kanwil Ditjen Provinsi Jambi menyampaikan beberapa arahan, diantaranya:

1. Terima kasih atas paparan yang menunjukkan optimisme baik pajak maupun bea cukai, serta PNBP sesuai tusi masing-masing.
2. Dari sisi pajak, meskipun ada koreksi, kita tetap optimis dapat melebihi target.
3. Dari sisi bea cukai terkait dengan bea keluar yang mengalami penurunan tarif sepertinya hampir semua termasuk Riau juga mengalami penurunan bea keluar, mungkin juga karena volatilitas harga dunia yang mempengaruhi. Selain itu terkait PLB, akan terus kita lakukan koordinasinya dengan Kemenkeu Satu maupun dengan pemerintah daerah terkait dalam hal ini Gubernur Jambi, Bupati Kab. Kerinci ataupun Walikota Kota Sungai Penuh,
4. Dari DJKN terkait dengan nilai asset yang dikelola sangat luar biasa, belum lagi seluruh satker melakukan pencatatan secara rapi maka nilainya akan terus bertambah baik tanah maupun yang lainnya. Terkait PSN, dari Betung ke Tempino masih berproses yang juga didukung oleh BLU LMAN. Terkait dengan lahan eks pertamina yang juga sudah disampaikan Pak Darnadi karena ternyata Kemenkeu ada asset tanah 4800 m2 yang dikelola pertamina tapi sudah selesai dan akan dikembalikan kepada Kemenkeu. Mungkin ke depannya dapat kita manfaatkan untuk rusunawa.
5. Dari sisi DJPb, di belanja negara sudah berada di 83,25% terhadap pagu dan proyeksi realisasi belanja sampai akhir tahun di atas 90%. Belanja pegawai dan barang semoga bisa tercapai. Kemungkinan akan sulit tercapai di belanja modal karena baru tercapai kurang dari 60%. Untuk angka final TKD dapat dilihat setelah DD dan DBH disalurkan seluruhnya.
6. Isu lainnya, mulai tahun ini menerapkan RPAT (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) untuk menampung belanja khusus LS kontraktual

yang dikerjakan pihak ketiga tetapi BAST nya baru. Artinya dari sisi pencatatan akan dicatat sebagai belanja, setelah pihak ketiga menyelesaikan pekerjaannya dan menyampaikan seluruh persyaratan, barulan dari rekening penampungan akan disalurkan ke rekening pihak ketiga. Secara tidak langsung akan berpengaruh ke perpajakan. Pengaruh RPAT mungkin dapat menjadi bahan kajian di tahun-tahun berikutnya.

7. Rekomendasi dari Pak Junaidi layak untuk menjadi rekomendasi kita ke pusat yaitu apa yang harus kita lakukan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Fiskal tools menarik untuk menjawab berbagai permasalahan pengangguran. Terkait riset dan pengembangan, ada rencana dukungan fiskal untuk tahun 2024 yang diharapkan lebih banyak riset yang dilakukan terhadap Provinsi Jambi.

# PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS/TEMATIK.

*Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV*

## PELAKSANAAN KEGIATAN TEMATIK

### 1. FGD PEMBAHASAN DRAFT *EMISSION REDUCTION PAYMENT AGREEMENT* (ERPA)

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB s.d. selesai bertempat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan BPKPD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas TPHP, DP3AP2, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, SN PMU, Ketua Bidang MAR, Ketua Bidang BSM, Ketua Bidang Safeguard, Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi, serta IC-SNPC.

**c. Rincian Kegiatan**

Acara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut disampaikan terkait *Update Pre-Investment* (2021-2025), Hal-hal yang Perlu Disepakati, Proporsi Dokumen BSP, Hasil Verifikasi Dokumen BSP, serta Hasil Pembahasan Pra Negosiasi dan Pembahasan *Term Sheet*.

**d. Hasil yang Dicapai**

Kegiatan dilaksanakan dengan membahas terkait kerja sama pengelolaan BioCF di Provinsi Jambi yang akan didanai oleh *World Bank*.

### 2. *JEBAC INTERNATIONAL CONFERENCE*

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 November 2023 pada pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Swiss-Belhotel Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa Universitas Jambi, beberapa peserta dari berbagai negara seperti Pakistan, Yaman, Gambia, dan Malaysia dengan narasumber Asst. Prof. Mazhar Islam, Ph. D (Loyola University, New Orleans, Amerika Serikat), Asst. Prof. Chidchanok Anantamongkulkul, Ph. D (Phuket Rajabhat University, Thailand), Prof. Diana Sari, SE, M. Mgt, Ph. D (Universitas Padjadjaran), dan Assoc. Prof. Dr. Jati Kasuma (Universitas Teknologi Mara Serawak, Malaysia) serta dihadiri oleh

Kepala Bidang PPA II, Kepala Bidang PAPK, Kepala Seksi PPA II B, Kepala Seksi PPA I C bersama dengan akademisi dan mahasiswa FEB Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagi peserta untuk mempresentasikan temuan penelitian di bidang Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi serta mendiskusikannya, menumbuhkan jaringan yang kuat, memperluas perspektif, dan menghasilkan ide-ide inovatif yang dapat membantu kita mengatasi tantangan ekonomi global saat ini, berkontribusi pada pengembangan strategi dan kerangka kerja yang dapat memandu perekonomian menuju masa depan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan, serta keterlibatan pemerintah termasik dukungan pendanaan pada kegiatan dan hasil kegiatan, dengan peran kementerian keuangan.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan *welcoming remarks* oleh Prof. Dr. H. Junaidi, SE, M. Si selaku Dekan FEB Universitas Jambi dan *opening speech* oleh Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc, Ph. D selaku Rektor Universitas Jambi. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait "*Nature's Dividends: Economic Resilience through Conservation*" oleh Asst. Prof. Mazhar Islam, Ph.D (Loyola University, New Orleans) Amerika Serikat dan "*Sustainable development strategy: ways to go for tourismoperator post-crisis: An Experience from Thailand*" oleh Asst. Prof. Chidchanok Anantamongkulkul, Ph.D (Phuket Rajabhat University), Thailand. Pada sesi kedua disampaikan materi mengenai "*The Future of Sustainable Marketing: Indonesian Customer Response*" oleh Prof. Diana Sari, SE, M. Mgt, Ph. D (Universitas Padjadjaran), Indonesia dan "*Building Sustainable and Resillent Community BasedTourism through Cooperatives*" oleh Assoc. Prof. Dr. Jati Kasuma (Universiti Teknologi Mara Serawak), Malaysia.

**d. Hasil yang Dicapai**

Kegiatan tersebut merupakan platform ideal bagi akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk terlibat berdiskusi, bertukar ide, dan mengeksplorasi solusi inovatif untuk mencapai tujuan. Diharapkan dari kegiatan tersebut dapat mengatasi hal-hal yang mendesak tanggung jawab membangun perekonomian

yang berketahanan dan berkelanjutan mendapatkan hal-hal baru wawasan tentang cara menciptakan keberlanjutan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan masa depan.

**3. *TREASURY GOES TO SCHOOL***

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 bertempat di SMKN 5 Kota Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Guru Kejuruan dan Siswa Akuntansi SMKN 5 Jambi bersama dengan perwakilan dari Kanwil DJPb Jambi oleh Bidang PPA II dan PAPK.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Perwakilan Guru SMKN 5 Kota Jambi dan Kepala Bidang PPA II. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh perwakilan dari Bidang PAPK dan Bidang PPA II terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, UU HKPD, dan Transfer ke Daerah Provinsi Jambi.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, kuis, dan penyerahan hadiah sekaligus foto bersama.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari pelaksanaan kegiatan *Treasury Goes to School* yang telah diselenggarakan diharapkan dapat menambah pemahaman oleh siswa SMKN 5 Jambi atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan UU HKPD dan TKD sebagaimana dapat diukur dengan nilai kuis (*post-test*) siswa SMKN 5 Jambi dan memperlengkapi kurikulum ajar akuntansi untuk mengenalkan implementasi akuntansi di pemerintahan.

**4. *WORKSHOP* PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PRODI IV KEUANGAN DAERAH FEB UNIVERSITAS JAMBI**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2023 pada pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Diamond 2, Hotel Aston Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang SKKI dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia KPPN Jambi selaku narasumber bersama akademisi dan mahasiswa Universitas Jambi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *workshop* dibuka dengan *overview* SAKTI oleh Kepala Bidang SKKI yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Modul Admin dan Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara dan Pembayaran, dan Modul Pelaporan. Acara dilanjutkan dengan praktikum pembuatan usulan UP dan SPP/SPM LS Non Kontraktual.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari kegiatan *workshop* yang telah dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai latar belakang Aplikasi SAKTI, keunggulan, fitur, manfaat, dan cakupan Modul SAKTI, serta interaksi antar Modul SAKTI.

**5. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN DENGAN PEMKAB BUNGO, TEBO, TANJUNG JABUNG TIMUR, DAN PEMPROV JAMBI**

**a. Waktu dan Tempat**

1) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Bungo dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dan dilakukan di tempat kedudukan masing - masing Pihak Kesatu dan Pihak Kedua
2) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tebo dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 10.30 s.d. 14.00 WIB bertempat di Chop Buntut Cak Yo Jambi
3) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tanjabtim dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pukul 10.30 s.d. 13.00 WIB bertempat di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.

4) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemprov Jambi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Penandatangan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Bapak Burhani AS bersama Bupati Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur, dan Gubernur Jambi dengan didampingi oleh perangkat daerah dari masing – masing wilayah serta perwakilan dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi (Bidang PPA II, Bidang PAPK, dan Bagian Umum).

**c. Rincian Kegiatan**

1) Penandatangan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Bungo dilakukan pada wilayah kedudukan masing – masing pihak yang diawali dengan penandatanganan oleh Pihak Kedua (Bupati Bungo) di Kabupaten Bungo dan dilanjutkan penandatanganan oleh Pihak Kesatu (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi) di Kota Jambi. Sebelumnya telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama pada hari Kamis, 7 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bungo untuk membahas dan melakukan reviu dari nota kesepakatan dimaksud.
2) Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tebo dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepakatan yaitu dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang kolaboratif dengan Pemda untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, disampaikan juga reviu dari pelaksanaan anggaran dari Pemkab Tebo. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bupati Tebo yang menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Pemkab Tebo dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus terjaga dan semakin ditingkatkan.
3) Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepakatan yaitu dalam rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang kolaboratif dengan Pemda untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, disampaikan juga reviu dari pelaksanaan anggaran dari Pemkab Tanjung Jabung Timur. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur yang menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dengan Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus terjaga dan semakin ditingkatkan.
4) Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemprov Jambi dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan maksud dan tujuan dari penandatanganan nota kesepakatan yaitu dalam

rangka menjalin komunikasi dan sinergi yang kolaboratif dengan Pemda untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Selain itu, disampaikan juga reviu dari pelaksanaan anggaran dari Pemprov Jambi. Acara Penandatanganan Nota Kesepakatan sekaligus berbarengan dengan Rakorwil Camat

*Penandatangan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tebo*

*Penandatangan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur*

*Penandatangan Nota Kesepakatan dengan Pemprov Jambi*

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan yang telah dilakukan, didapatkan poin-poin sebagai berikut:

1) Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang turut disaksikan oleh perwakilan dari Pihak Kanwil DJPb Provinsi Jambi dan perangkat daerah dari masing - masing wilayah.

2) Diharapkan dari kegiatan ini, setiap rupiah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dapat terserap dengan baik serta sinergi antara masing - masing Pemerintah Daerah dengan OPD ternasuk di dalamnya Bakeuda dan DPMD terus berjalan dengan baik dan ke depan dapat diteruskan dan dikoordinasikan.

## PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS

### 1. REKONSILASI DATA DAN IURAN IWP 8%, JKK, DAN JKM PNS, PPPK, DAN PEJABAT NEGARA CATURWULAN III TAHUN 2023

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Rumah Kito Resort Hotel Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi bersama para Kepala KPPN lingkup Provinsi Jambi serta para pengguna layanan Taspen.

**c. Rincian Kegiatan**

Acara dimulai dengan sambutan Branch Manager Taspen Jambi dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, dilanjutkan dengan sosialisasi Produk Taspen Life serta Produk Mandiri Taspen, dan ditutup dengan rekonsiliasi data dan iuran ASN caturwulan II Tahun 2023.

Taspen Life merupakan anak perusahaan PT TASPEN (Persero) dengan kepemilikan saham 99,97% dan 0,03% saham yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Taspen Jakarta. Taspen Life menyediakan beragam solusi produk asuransi jiwa kumpulan dan individu, yang memiliki manfaat proteksi jiwa, perencanaan masa depan dan hari tua, dana pendidikan serta asuransi penyakit kritis. Adapun produk dari Taspen Life meliputi jaminan kematian, tabungan hari tua, program pension, taspen *bright life*, dan taspen smart save.

Pada acara tersebut, diperkenalkan juga produk mandiri taspen, yakni Bank Mantap (Mandiri-Taspen). Program Mantap Indonesia bertujuan memberikan kontribusi positif dalam rangka terciptanya lingkungan dan masyarakat yang mantap dan sejahtera. Terdapat tiga pilar utama terkait program Mantap Indonesia : 1Mantap Sehat, 2Mantap Aktif, dan 3Mantap Sejahtera.

Kemudian, dilakukan juga rekonsiliasi data dan iuran ASN caturwulan II Tahun 2023 antara PT. Taspen dengan KPPN lingkup Provinsi Jambi. Rekonsiliasi data ASN (Aparatur Sipil Negara) dan iuran IWP (Iuran Wajib Pegawai), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), serta JKM (Jaminan Kematian) merupakan kegiatan

yang tak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan finansial para pegawai negeri, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan pejabat negara. Rekonsiliasi juga sebagai media pertukaran informasi terkait kendala atau permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pengelolaan data gaji dan upaya penyelesaiannya.

**d. Hasil yang Dicapai**

Memberikan informasi kepada para pengguna layanan taspen terkait dengan asuransi Taspen Life dan Bank Mantap yang bisa digunakan untuk para pensiunan, serta meningkatkan keakuratan data ASN dan Iuran IWP untuk periode Caturwulan III Tahun 2023.

## 2. RILIS BERSAMA PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI TRIWULAN III 2023

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 6 November 2023 pada pukul 13.30 hingga 16.00 WIB bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi termasuk Kepala Kantor Unit Vertikal Kemenkeu Jambi, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Perwakilan Bank BTN, Perwakilan Bulog, dan media massa.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan *press release* dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan Kinerja Fiskal di Provinsi Jambi baik itu APBN dan APBD, *outlook* perekonomian provinsi Jambi ke depan dan Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan III 2023. Kegiatan ini merupakan sinergi dari Kanwil DJPb Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi dan

Perwakilan Bank Indonesia untuk memberikan informasi yang menyeluruh dan seluas-luasnya serta mendorong perekonomian Provinsi Jambi menuju Provinsi Jambi yang sejahtera.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan paparan *outlook* perekonomian Provinsi Jambi (*forward looking*) dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Kinerja Fiskal baik itu APBN dan APBD di Provinsi Jambi oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi kemudian paparan terkait dengan pertumbuhan perekonomian Triwulan III 2023 Provinsi Jambi, sesi pertanyaan yang diajukan oleh media massa.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan kegiatan rilis bersama yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Penerimaan negara mengalami pertumbuhan dengan Pendapatan Pajak tumbuh positif ditopang oleh Pertumbuhan pada Pajak Pertambahan Nilai yang mencerminkan adanya pertumbuhan produksi barang/jasa yang disertai oleh kenaikan konsumsi masyarakat serta Penerimaan Negara Bukan Pajak tumbuh ditopang oleh PNBP lainnya yang mencatatkan penerimaan tertinggi dalam 5 tahun terakhir seiring dengan terus naiknya aktivitas Masyarakat terhadap layanan publik.
2. Belanja negara tumbuh signifikan yang didukung oleh belanja pemerintah pusat yang tumbuh kuat karena didorong oleh tumbuhnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Namun, Belanja TKD sedikit terkontraksi yang disebabkan perubahan tata cara penyaluran pada DAU dan Dana Insentif Daerah, serta peningkatan proyek DAK Fisik dengan tata cara pembayaran sekaligus.
3. Perekonomian Provinsi Jambi tumbuh 4,8% (yoy) pada triwulan II 2023. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian secara nasional.

## 3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) RUAS BETUNG-TEMPINO-JAMBI PADA SEKSI III

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Exit Tol Ruas Betung-Tempino-Jambi, Desa Muaro Sebapo.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Kepala KPPN Jambi, Kepala Seksi PPA IC, dan para perwakilan pejabat BPJN I.

**c. Rincian Kegiatan**

Acara dimulai dengan pemberian gambaran umum progress pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PPK selaku perwakilan BPJN I. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi serta Kepala KPPN Jambi.

Pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Jambi akan menjadi bagian penting dari jaringan transportasi yang lebih luas di pulau Sumatera, sehingga akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperlancar pergerakan orang dan barang. Pembangunan jalan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong kemajuan Indonesia secara umum.

Sampai dengan 30 November 2023, realisasi anggaran mencapai Rp727,82 miliar atau sebesar 46,31% dari target. Secara umum, progres penyelesaian fisik pekerjaan cukup bagus, bahkan beberapa paket pekerjaan progress fisik pekerjaan telah melampaui progres keuangan, dimana progress fisik s.d. 30 November 2023 yakni sebesar 73,36%. JTTS sejauh 30 KM ini direncanakan akan selesai pada bulan Juli Tahun 2024.

**d. Hasil yang Dicapai**

Memberikan informasi terkait dengan progress pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung-Tempino-Jambi.

# PELAKSANAAN KEGIATAN *LOCAL EXPERT*.

Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV

## PELAKSANAAN KEGIATAN *LOCAL EXPERT*

### 1. *TREASURY GOES TO CAMPUS*

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan *Treasury Goes to Campus* dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB bertempat di Aula Rektorat Lantai III Universitas Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan para dosen dan mahasiswa Universitas Jambi dengan narasumber Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Bapak Burhani AS, dan Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Bapak Fauzi Syafriel, dan dimoderatori oleh Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, Ibu Erni Achmad. Selain itu, dihadiri juga oleh Dekan FEB Universitas Jambi sekaligus Local Expert Provinsi Jambi yaitu Bapak Junaidi sebagai *Keynote Speaker*.

**c. Rincian Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan *Treasury Goes to Campus* dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah kepada Mahasiswa di Universitas Jambi, mensosialisasikan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *treasurer, regional chief economist*, dan *financial advisor* bagi daerah, bersinergi dengan *Local Expert* dan Perguruan Tinggi sebagai *center of knowledge* dalam menyampaikan informasi, gagasan terkait kegiatan *regional chief economist* untuk mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, serta sebagai penyelesaian/tindak Lanjut atas arahan Rapat/Kegiatan Menteri Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan dan Executive Dialogue Ditjen Perbendaharaan Tahun 2023.

Kegiatan Treasury Goes to Campus dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Erni Achmad, S.E., M.Si dan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi yang disampaikan adalah Sosialisasi Implementasi UU HKPD oleh Bapak Burhani AS dan Pengenalan *Regional Chief Economist* oleh Bapak Fauzi Syafriel. Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

**d. Hasil yang Dicapai**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan *Treasury Goes to Campus* ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa dan penjelasan peran mahasiswa dalam mendukung implementasi UU HKPD. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan gambaran peran *Regional Chief Economist* di Provinsi Jambi serta keterlibatan para akademisi dalam kajian RCE

**2. FGD DISEMINASI FISKAL REGIONAL DALAM MENGATASI KETIMPANGAN FISKAL DAERAH SESUAI IMPLEMENTASI UU NO. 1 TAHUN 2022 DAN RAPAT DALAM FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

**a. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Ruang Aula Kanwil DJPb Jambi.

**b. Unit/Pihak Terlibat**

Kegiatan dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai Bidang PPA II dan dengan mengundang Pemerintah Provinsi Jambi, dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Selain 4 Pemerintah Daerah, kegiatan ini juga melibatkan *Local Expert* Jambi untuk menambah ruang lingkup pembahasan dari cara pandang akademisi.

**c. Rincian Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi yang tertuang dalam Laporan ALCo bulan Agustus dan September 2023 tentang ketimpangan fiskal,

sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, serta masyarakat. Kegiatan ini juga memiliki maksud untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi ketimpangan fiskal di Provinsi Jambi, serta *progress* dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi dan pemanfaatan pembiayaan daerah, dana abadi daerah, dan lintas sumber pendanaan serta dalam rangka memperkuat sinergi serta kerja sama antara Kanwil DJPb dengan Pemda dan Satker dalam pengelolaan keuangan negara sehingga mampu meningkatkan perekonomian.

Agenda dibuka oleh MC yang dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Materi mengenai ketimpangan fiskal yang tertuang dalam laporan ALCo disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II, Bapak Fauzi Syafriel yang kemudian dilanjurkan dengan *feedback* dari *local expert*.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1) Pada UU HKPD telah disampaikan beberapa strategi untuk mengurangi ketimpangan fiscal daerah diantaranya terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan terkait hutang dan *creative financing* seperti perluasan skema pembiayaan daerah, melalui Dana Abadi Daerah, dan sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan.
2) Berdasarkan data periode September 2023, dari tingkat kemandirian fiskal, Provinsi Jambi memiliki tingkat ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah yang paling kecil, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat kemandirian fiskal terkecil sehingga tingkat ketergantungan pada Transfer ke Daerah menjadi paling tinggi.
3) Pada data operasi gabungan Pemerintah periode Januari 2023, diketahui ending cash balance di RKUD sebesar Rp 2,2 T, dan pada posisi Agustus 2023 sebesar Rp 3,3 T. Sehingga dapat diperkirakan bahwa Pemda masih memiliki

kemungkinan untuk membentuk Dana Abadi Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang ada di Provinsi Jambi.

4) Secara umum, Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi masih memanfaatkan SILPA untuk menutupi defisit yang ada di daerah dan belum banyak memanfaatkan pinjaman/pembiayaan.
5) Sedangkan untuk Dana Abadi Daerah, Pemerintah Daerah masih mengalami beberapa kendala untuk dapat membentuknya, diantaranya belum adanya aturan turunan atas UU HKPD terkait dengan skema pembiayaan, masih besarnya kebutuhan pendanaan infrastruktur dasar, serta kapasitas fiskal daerah di beberapa kabupaten kota yang masih rendah dan sedang.

## 3. FGD DISEMINASI DAN FKPKN FISKAL REGIONAL TERKAIT KONDISI DAN STRATEGI DALAM PENGURANGAN PENGANGGURAN

### a. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Ruang Aula Kanwil DJPb Jambi.

### b. Unit/Pihak Terlibat

Kegiatan dihadiri oleh seluruh pejabat/pegawai Bidang PPA II dan dengan mengundang BPS Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, DPMPTSP Provinsi Jambi, Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi, dan Local Expert Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang berasal dari Universitas Jambi untuk menambah ruang lingkup pembahasan dari cara pandang akademisi.

### c. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi yang tertuang dalam Laporan ALCo bulan Oktober dan November 2023 tentang SDM dan ketenagakerjaan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat serta investor. Kegiatan ini juga memiliki maksud untuk mengetahui faktor penyebab tingkat pengangguran dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran, peningkatan investasi daerah serta perbaikan kondisi iklim dunia usaha di Provinsi Jambi serta dalam rangka memperkuat sinergi serta kerja sama antara Kanwil DJPb dengan Pemda dan Satker dalam pengelolaan keuangan negara sehingga mampu meningkatkan perekonomian.

Agenda dibuka oleh MC dan dimoderatori oleh Bapak Fauzi Syafriel selaku Kepala Bidang PPA II yang dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi, diantaranya:

1) Penyelarasan Kurikulum SMK dalam Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Dunia Usaha dan Industri oleh Bapak Syamsurizal (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi)
2) Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi oleh Ibu Sisilia Nurteta (BPS Provinsi Jambi)
3) Jenis dan Mekanisme Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi oleh Ibu Desye Riyani (Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi)
4) Potensi dan Peluang Investasi oleh Ibu Dwi Nastiti Arumsari (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi)
5) Peran Disnakertrans Provinsi Jambi dalam Ketenagakerjaan dan Pengurangan Pengangguran di Provinsi Jambi oleh Bapak Tarsa Syafri dan Bapak Agung Al Ambiya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi)

Setelah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber, kegiatan ditutup dengan tanggapan dari *Local Expert* dan diskusi serta tanya jawab untuk masing – masing peserta.

**d. Hasil yang Dicapai**

Dari hasil kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator salah satunya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Tingkat pendidikan, akses pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

2) Terkait komposisi Angkatan Kerja Agustus 2023, 1,8 juta orang bekerja dan 85,58 ribu orang pengangguran. TPT Jambi lebih rendah dibandingkan nasional, dan cenderung menurun selama periode 2021-2023. TPT di Provinsi Jambi bervariasi antar kabupaten/kota, tertinggi berada di Kota Jambi (8,27%) dan terendah berada di Kabupaten Tanjabtim (1,67%).
3) Intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi, seperti melalui program-program untuk penyelarasan kurikulum SMK dengan kompetensi kebutuhan lulusan, pelaksanaan pelatihan, serta kebijakan-kebijakan penurunan tingkat pengangguran lainnya.
4) Investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi.

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

*Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara Triwulan IV*

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### KESIMPULAN

1. Dalam rangka meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, APBD, dan TKD, telah dilaksanakan edukasi terhadap Satuan Kerja maupun OPD terkait secara berkelanjutan melalui pembinaan, sosialisasi, dan rapat koordinasi baik dari sisi perencanaan hingga pelaporan keuangan negara mengingat perubahan peraturan yang sangat dinamis.
2. Demi mendukung pemberdayaan serta penguatan peran UMKM terhadap perekonomian Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan melibatkan seluruh Kemenkeu Satu Provinsi Jambi dan para *stakeholder* Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi melaksanakan bazar UMKM dalam rangka HORI ke-77.
3. Untuk melaksanakan pemenuhan target pelaksanaan anggaran triwulan dan pemenuhan pelaksanaan monev PNBP, Kanwil DJPb Provinsi Jambi dengan melibatkan satker dalam wilayah Provinsi Jambi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan harmonisasi belanja pemerintah serta transfer ke daerah.
4. Sebagai upaya untuk mengetahui faktor penyebab tingkat pengangguran dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran, peningkatan investasi daerah serta perbaikan kondisi iklim dunia usaha di Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi menyelenggarakan FGD Diseminasi dan FKPKN Fiskal Regional terkait Kondisi dan Strategi dalam Pengurangan Pengangguran
5. ALCo atau *Asset and Liabilities Committee* Regional merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo di tingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat regional seperti informasi terkait APBN, APBD, Perpajakan, Bea Cukai dan Kekayaan Negara lingkup wilayah Provinsi Jambi yang menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi.
6. Sebagai upaya mewujudkan penguatan dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti akademisi, pimpinan daerah, dan profesional di bidang ekonomi dan keuangan negara di wilayah Provinsi Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah mensinergikan FKPKN dengan TPID, TP2DD, TPPS, dan berpartisipasi dalam keterlibatan berbagai forum di daerah seperti Rekonsiliasi Data dan Iuran IWP 8%, JKK, dan JKM PNS, PPPK, dan Pejabat Negara Caturwulan III Tahun 2023 serta melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.

**REKOMENDASI**

1. Melaksanakan monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan secara rutin triwulanan. Monitoring berupa hal-hal yang harus dilakukan oleh satker untuk akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi agar segera dapat diberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara daring agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengikuti kegiatan dengan fleksibel dan tidak terbatas pada satuan kerja vertikal tetapi pada Pemerintah Daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah.
2. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ALCo Regional baik Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, *local expert* dan instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat sehingga ALCo Regional yang disusun menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas BLUD, hal yang paling dibutuhkan adalah pembangunan komitmen oleh pimpinan serta pihak Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat menyelenggarakan kegiatan FGD bersama dengan pimpinan BLUD berkaitan dengan sustaiabilitas pengelolaan BLUD.
4. Intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi, seperti melalui program-program untuk penyelarasan kurikulum SMK dan pelaksanaan pelatihan. Selain itu, investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi.
5. Membangun dan meningkatkan komunikasi dua arah dengan Pemerintah Daerah. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jambi, hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD termasuk dana TKD. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, baik Kanwil DJPb dan Pemerintah dapat lebih aktif dalam melakukan pertukaran data untuk kepentingan analisis yang berguna bagi peningkatan pengelolaan keuangan negara.
6. Membangun komunikasi dengan satker pusat yang berada di wilayah Jambi. Hal ini bertujuan agar Kanwil DJPb Provinsi Jambi mengetahui kendala yang dihadapi satker dalam penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan optimalisasi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) satker. Bagi satker, hal ini perlu karena bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan terkait penyaluran APBN, pengelolaan keuangan dan mengoptimalisasikan nilai IKPA.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

# Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi